



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG

FAKULTAS HUKUM

**IMPLEMENTASI UU NO 7 TH 2017 TENTANG PEMILU
DALAM MENINGKATKAN KETERWAKILAN PEREMPUAN
SEBAGAI BAWASLU BLORA**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan

Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum

Disusun Oleh :

DHONI IFTITAH KURNIAWATI

NPM : 211003742018623

SEMARANG

2025

i



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG FAKULTAS
HUKUM

**IMPLEMENTASI UU NO 7 TH 2017 TENTANG PEMILU
DALAM MENINGKATKAN KETERWAKILAN PEREMPUAN
SEBAGAI BAWASLU BLORA**

SKRIPSI

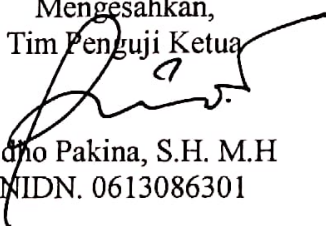
Telah dilakukan pengujian dihadapan Tim Penguji Dan memenuhi persyaratan
menyelesaikan pendidikan Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum

Disusun Oleh :


DHONI IFTITAH KURNIAWATI

NPM : 211003742018623

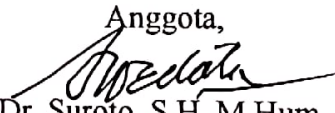
Mengesahkan,
Tim Penguji Ketua


Ridho Pakina, S.H. M.H
NIDN. 0613086301

Anggota,


Dr. Edi Pranoto, S.H.,M.Hum
NIDN.0612046501

Anggota,


Dr. Suroto, S.H.,M.Hum
NIDN. 0603045901

Mengetahui
Dekan,

Dr.EDY LISDIYONO, S.H.,M.Hum
NIDN : 0625046301

SEMARANG
2025

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pembatasan Masalah	5
C. Perumusan Masalah.....	5
D. Tujuan Penelitian :.....	6
E. Kegunaan Penelitian	6
F. SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Negara Hukum.....	8
B. Teori Demokrasi.....	10
C. Keterwakilan Perempuan.....	16
D. Pemilihan Umum.....	18
E. Penyelenggara Pemilihan Umum	20

BAB III METODE PENELITIAN.....	30
A. Tipe Penelitian.....	30
B. Spesifikasi Penelitian.....	30
C. Sumber Data	30
D. Metode Pengumpulan Data	31
E. Metode Penyajian Data.....	32
F. Metode Analisis Data	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA	34
A. Gambaran Objek Penelitian.....	34
B. Implementasi Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Keterwakilan Perempuan Sebagai Bawaslu Di Blora.....	40
C. Faktor Penghambat Terpenuhinya Keterwakilan Perempuan Berdasarkan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Di Blora.....	59
BAB V PENUTUP.....	68
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	70

ABSTRAK

Penelitian ini berawal dari pengamatan terhadap komposisi keanggotaan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Blora berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal 10 ayat 7 dalam undang-undang tersebut mengatur bahwa keterwakilan perempuan dalam keanggotaan Bawaslu Kabupaten/Kota harus mencapai sekurang-kurangnya 30%. Namun, penelitian ini tidak hanya berfokus pada keanggotaan Bawaslu saja, tetapi juga mencakup pengawasan pada badan adhoc. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dalam meningkatkan keterwakilan perempuan di Bawaslu Kabupaten Blora, serta (2) apa saja faktor yang menghambat terpenuhinya keterwakilan perempuan dalam keanggotaan Bawaslu. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis. Data yang digunakan bersumber dari data primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui studi pustaka serta wawancara, dan dianalisis dengan metode normatif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan di Bawaslu Kabupaten Blora masih belum mencapai target 30%. Pada periode 2019-2024, dari tiga anggota Bawaslu, hanya satu yang merupakan perempuan. Di tingkat Panwascam, keterwakilan perempuan hanya mencapai 23%, sedangkan di tingkat Panwaslu baru mencapai 28%. Faktor-faktor penghambatnya meliputi kurangnya minat perempuan, budaya patriarki, sosialisasi yang kurang efektif, rendahnya kepercayaan diri perempuan, serta adanya perbedaan kearifan lokal di setiap wilayah.

Kata kunci: Keterwakilan Perempuan, Pengawas, Bawaslu